

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UMKM DI KOTA GORONTALO

Yahya Antu¹, Elnino Husein Mohi², Rukiah Nggilu³, I Kadek Satria Arsana⁴,
Fadly Binolombangan⁵, Non Endey⁶, Maryam Laleno⁷

¹²³⁴⁵⁶Universitas Bina Taruna Gorontalo

yahyaantu03@gmail.com¹; elninogorontalo@gmail.com²;
nggilurukiah23365@gmail.com³; satriaarsana28@gmail.com²⁴;
binolombanganfadly@gmail.com⁵; nonendey71@gmail.com⁶,
lalenomar70@gmail.com⁷

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekonomi pemerintah Kota Gorontalo dan implikasinya terhadap eksistensi dan perkembangan UMKM di masa pandemi covid 19. Populasi ditetapkan dan pengambilan sampelnya secara *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dampak bagi sektor ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemik covid 19 sangat memukul bagi pelaku UMKM. Terutama dari sisi distribusi bahan baku, penjualan, laba usaha, dan modal. Semuanya mengalami penurunan pendapatan sejak pandemic melanda Indonesia khususnya Kota Gorontalo. Diperlukan peran nyata dari pemerintah yaitu kerjasama dan sinergi yang baik antara pemerintah/instansi terkait dengan pelaku UMKM, sehingga kondisi perekonomian pelaku UMKM dapat berangsur pulih. Kerjasama dalam membentuk pelayanan/toko/tempat oleh-oleh khas Kota Gorontalo. Kegiatan makan minum sehari-hari pegawai dan rapat makan dan minum di lingkup Pemerintah kota Gorontalo diarahkan untuk menggunakan produk UMKM. Namun, dari sisi penganggaran, intinya instansi terkait sangat berharap agar rencana tersebut segera terealisasi, sehingga perekonomian pasca pandemic secara keseluruhan, serta bagi UMKM khususnya, dapat kembali normal dan membaik.

Kata Kunci: **Implementasi Kebijakan; Ekonomi; Implikasi**

ABSTRACT

This study aims to analyze the economic policy of the Gorontalo City government and its implications for the existence and development of MSMEs during the COVID-19 pandemic. The population is determined and the sample is taken by purposive sampling. This study uses a qualitative descriptive method. Analysis of interactive model data from Miles and Huberman, which begins with the process of data collection, data simplification, data presentation, and drawing conclusions. The impact on the economic sector caused by the COVID-19 pandemic has hit MSMEs very hard. Especially in terms of distribution of raw materials, sales, operating profit, and capital. All of them have experienced a decrease in income since the pandemic hit Indonesia, especially Gorontalo City. A real role is needed from the government, namely good cooperation and synergy between the government/agencies related to MSME actors, so that the economic condition of MSME actors can gradually recover. Cooperation in forming services/shops/places for souvenirs typical of the City of Gorontalo. The daily eating and drinking activities of employees and eating and drinking meetings within the Gorontalo City Government are directed to use MSME products. However, in terms of budgeting, the point is that the relevant agencies really hope that the plan will be realized soon, so that the post-

pandemic economy as a whole, as well as for MSMEs in particular, can return to normal and improve.

Keywords: Policy Implementation; Economy; Implications

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestic negara dan keberadaan UMKM. Pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Tak terkecuali implikasinya terhadap perekonomian nasional Indonesia terutama sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi.

Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97% dari total tenaga kerja di sektor ekonomi). Pandemi Covid-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki criteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut, (Tambunan, 2012). UMKM adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Anggraeni, 2017).

Menurut Kemenkop UKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini. Sekitar 56% melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22% melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Masalah-masalah di atas juga semakin meluas jika dikaitkan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Pentingnya UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian di Kota Gorontalo, perlu mendapatkan perhatian serius dan dijadikan bahan evaluasi pemerintah untuk merancang kebijakan dan strategi yang tepat bagi eksistensi UMKM di Kota Gorontalo.

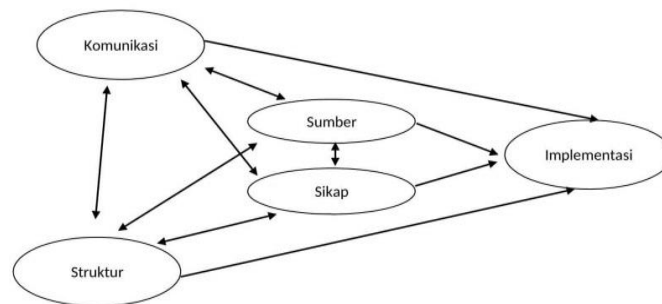
Dalam berbagai penelitian menunjukkan pentingnya UMKM bagi ketahanan ekonomi daerah dan nasional. Untuk itu perlunya kebijakan pemerintah yang benar-benar dapat membuat UMKM dapat tetap eksis dan bertahan di segala kondisi terutama di saat pandemi covid 19 saat ini. Penelitian ini dibatasi pembahasannya pada kebijakan pemerintah kota Gorontalo dan implementasinya bagi pelaku UMKM di masa pandemi covid 19 dengan fokus pada implentasi kebijakan ekonomi dan implikasinya bagi pelaku UMKM di Kota Gorontalo mengingat Kota Gorontalo merupakan daerah dengan pendapatan utamanya dari sektor jasa dan perdagangan. (Winarno, 2016) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. (Pasolong, 2014) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum

Menurut (Winarno, 2016) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

(Nugroho, 2016) menjelaskan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementaiskan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Edward III dalam (Subarsono. AG, 2013), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Menurut Edward III dalam implementasi kebijakan ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu: komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya (Subarsono. AG, 2013)). Interaksi antara faktor-faktor tersebut dapat diilustrasikan seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Empat faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi kebijakan Publik
Sumber : George C. Edward III (Subarsono. AG, 2013)



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2016) yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada fenomena alamiah dan menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kebijakan ekonomi pemerintah Kota Gorontalo dan implikasinya terhadap eksistensi dan perkembangan UMKM di masa pandemi covid 19. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yakni implementasi kebijakan ekonomi pemerintah dan implikasi kebijakan terhadap UMKM. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan Observasi, Wawancara dan telaah dokumen. Analisa data dengan metode triangulasi data berupa pengumpulan data, reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian di Kota Gorontalo dengan waktu penelitian selama 3 bulan yakni dari bulan Juni-Agustus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Gorontalo merupakan ibukota di Provinsi Gorontalo, letaknya diapit oleh dua kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Letak astronomisnya antara 00^o28'17"-00^o35'56" Lintang Utara dan antara 122^o59' 44" – 123^o 05' 59" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Gorontalo sebesar 0,53 persen dari total luas daratan Provinsi Gorontalo. Sebagian besar kelurahan di Gorontalo merupakan desa non-pesisir, dengan jumlah keseluruhan 45 kelurahan dengan topografi wilayah sebagian besar berupa dataran, yaitu 36 kelurahan.

Di kota Gorontalo Jumlah UMKM yang terdaftar di Disnakerkop danUKM sebanyak 3.515 UMKM dengan jumlah tenaga kerja 7.702 pekerja dengan nilai produksi sebesar Rp.173. 088. 068. Sejak Covid 19 mewabah di Gorontalo jumlah aktivitas ekonomi UMKM terutama produksi, distribusi, dan penjualan mengalami gangguan terutama pada jumlah pendapatan yang menurun drastis. Untuk mengurangi dampak Covid 19 terhadap pelaku UMKM di Kota Gorontalo diperlukan suatu kebijakan ekonomi dari pemerintah Kota Gorontalo yang berpihak pada UMKM sebagai langkah nyata di dalam perlindungan kepada UMKM yang terkena dampak Covid 19. Kebijakan ekonomi pemerintah Kota Gorontalo saat ini hanya mengacu pada kebijakan ekonomi dari pusat berupa bantuan dan stimulus ekonomi, Restrukturisasi Kredit, serta bantuan yang bersifat jangka pendek seperti kartu prakerja. Pada situasi saat ini UMKM lebih membutuhkan kebijakan ekonomi berupa program bantuan pemulihan UMKM, aturan pendukung serta pembinaan UMKM untuk dapat lebih kreatif dan produktif dalam menghasilkan produk barang dan jasa sehingga tetap eksis walaupun di tengah pandemi covid 19.

Sejak tahun 2016-2020 jumlah pelaku UMKM terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Rekapitulasi Database UMKM Aktif di Kota Gorontalo
Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Klasifikasi Usaha			Total
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	2016	5161	2401	458	8020
2	2017	7795	2622	400	10817
3	2018	8598	2642	400	11640
4	2019	8770	2692	400	11862
5	2020	5792	1725	329	7783
6	2021	2234	956	325	3515

Sumber: Dinas Tenaga kerja, koperasi dan UKM kota Gorontalo 2021

Implementasi Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kota Gorontalo

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemik covid 19 terhadap pelaku UMKM di Kota Gorontalo yaitu antara lain proses pendistribusian bahan baku, penurunan laba usaha, penurunan jumlah penjualan, serta permodalan.

Pendistribusian Bahan Baku

Proses pendistribusian bahan baku yang lambat menyebabkan beberapa kelangkaan bahan baku yang digunakan untuk membuat produk UMKM. Kebijakan pembatasan berskala besar serta PPKM mikro yang diterapkan oleh pemerintah di Provinsi Gorontalo terutama perizinan melewati daerah perbatasan darat Pelabuhan laut dan udara menjadikan distribusi bahan baku bagi pelaku UMKM termasuk di Kota Gorontalo terhambat. Efek panik dari konsumen dengan membeli produk tertentu, membuat kelangkaan produk di pasaran. Di awal pandemi Covid-19, kebanyakan orang takut keluar rumah dan tidak berani bertemu dengan orang lain, karena takut terpapar Covid-19 yang dianggap mematikan. Jalanan sepi dengan kendaraan yang berlalu lalang, termasuk kendaraan pengangkut bahan baku berbagai produk UMKM.

Penurunan Laba Usaha

Laba adalah peningkatan kekayaan investor sebagai hasil dari investasi setelah dikurangi biaya yang terkait dengan investasi tersebut. Laba juga dapat diartikan sebagai selisih antara harga jual dan biaya produksi. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2001), bahwa laba atau laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya penelitian dan pengembangan. Penurunan penjualan produk tersebut terkait dengan kuantitas, jenis produk dan jumlah keuntungan UMKM di Kota Gorontalo. Kuantitas adalah jumlah produk yang terjual setiap hari dan setiap bulan mengalami penurunan. Begitu juga dengan jenis produk yang dijual setiap hari dan setiap bulannya menunjukkan tren penurunan sejak pandemi Covid 19 terjadi. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan laba atau pendapatan UMKM yang mengalami penurunan cukup signifikan. Analisis statistic menunjukkan rata-rata penurunan keuntungan UMKM di Kota Gorontalo sebesar 40% - 75%.

Penurunan Jumlah Penjualan

Kebijakan pembatasan berskala besar (PSBB) dan dilanjutkan dengan PPKM mikro oleh pemerintah membuat interaksi dan aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Aktivitas masyarakat yang terbatas ini membuat jumlah penjualan bagi pelaku UMKM mengalami penurunan yang sangat signifikan. Rata-rata jumlah penjualan bagi pelaku UMKM menurun hingga 85% di awal ketika terjadinya covid 19. Hal ini menyebabkan banyak usaha yang tutup atau gulung tikar.

Permodalan

Modal merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha/usaha, investasi, dan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Kebijakan pemerintah Kota Gorontalo di dalam mengatasi permasalahan terkait covid 19 saat ini berupa program pemulihan ekonomi daerah berupa pemberian bantuan langsung tunai bagi pelaku UMKM. Selain itu pemerintah Kota Gorontalo memberikan pelatihan kerja bagi pelaku UMKM produktif melalui Lembaga kerja pelatihan. Selain itu pemerintah Kota Gorontalo meringankan pembayaran pajak bagi pelaku usaha UMKM dengan belum melakukan penagihan terhadap pajak-pajak atau retribusi lainnya. Hal ini tentu sedikit mengurangi beban pelaku UMKM akibat dampak dari covid 19. Tetapi ini belum sepenuhnya efektif dirasakan oleh para pelaku UMKM. Kebijakan PPKM mikro yang terus digulirkan oleh pemerintah pusat dan daerah membuat produk-produk UMKM maupun kegiatan usaha lainnya belum bisa mendongkrak pendapatan masing-masing pelaku UMKM.

Implikasi Kebijakan Terhadap UMKM

Dampak yang ditimbulkan oleh covid 19 sangat luar biasa bagi pelaku UMKM terutama kelangsungan usaha yang sewaktu-waktu tutup atau gulung tikar dikarenakan minimnya pendapatan dan kebijakan PPKM atau pembatasan aktivitas masyarakat. Hasil FGD dan wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM, diketahui bahwa Pemerintah Kota Gorontalo sudah tanggap dengan kondisi UMKM pasca Covid 19. Bekerjasama dengan sektor perbankan yang juga telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu UMKM, begitu juga dengan pelaku UMKM sendiri sudah melakukan upaya untuk tetap produktif pasca Covid-19. Tindak lanjut terhadap bantuan pemerintah pusat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kota Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo. Sebanyak 25.768 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Gorontalo diajukan sebagai calon penerima bantuan sosial produktif bagi usaha mikro senilai Rp2,4juta dari Pusat. Permohonan bantuan untuk UMKM ini telah diusulkan oleh Dinas Tenaga kerja dan Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo. Program yang dikenal sebagai bantuan sosial produktif usaha mikro ini menysasar pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan. Bantuan ini ditujukan untuk mendorong pelaku UMKM tetap bergeliat. Bantuan bisa digunakan membeli kebutuhan produksi, biaya operasional, dan sebagainya.

Untuk pelaku UMKM yang menerima kredit, oleh perbankan diberikan relaksasi dan rekturisasi pinjaman untuk meminimalisir dampak covid 19. Kebijakan ini telah berlangsung sejak tahun 2020 yang lalu. Selain itu ada beberapa perbankan yang memberikan program keringan suku bunga dan jumlah angsuran. Implikasi dari kebijakan ini membuat para pelaku UMKM yang mengalami gradasi jumlah pendapatan untuk dapat tetap menjaga kelangsungan

usahanya. Secara statistik, terdapat 38,57% UMKM yang menerima keringanan dari perbankan di Kota Gorontalo. Selain pemberian bantuan langsung kepada pelaku UMKM, Pemerintah Kota Gorontalo memberikan pelatihan-pelatihan, workshop bagi pelaku UMKM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas pelaku usaha baik dalam penciptaan produk, proses produksi dan pemasaran.

KESIMPULAN

Dampak bagi sektor ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi covid 19 sangat memukul bagi pelaku UMKM. Terutama dari sisi distribusi bahan baku, penjualan, laba usaha, dan modal. Semuanya mengalami penurunan pendapatan sejak pandemi melanda Indonesia khususnya Kota Gorontalo. Diperlukan peran nyata dari pemerintah yaitu kerjasama dan sinergi yang baik antara pemerintah/instansi terkait dengan pelaku UMKM, sehingga kondisi perekonomian pelaku UMKM dapat berangsur pulih. Kerjasama dalam membentuk pelayanan/toko/tempat oleh-oleh khas Kota Gorontalo, Kegiatan makan minum sehari-hari pegawai dan rapat makan dan minum di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo diarahkan untuk menggunakan produk UMKM.

Semua saran dari peserta FGD sudah dipikirkan dan juga sudah diagendakan sebelumnya oleh instansi terkait, Namun, dari sisi penganggaran, intinya instansi terkait sangat berharap agar rencana tersebut segera terealisasi, sehingga perekonomian pasca pandemi secara keseluruhan, serta bagi UMKM khususnya, dapat kembali normal dan membaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F. D. (2017). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6., 1(6).
- Nugroho, A. S. (2016). *E-Commerce : Teori dan Implementasi*. Ekuilibra.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Subarsono. AG. (2013). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: : isu-isu penting*. LP3ES.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses dan Studi*

Kasus Kompratif). CAPC (Center Of Academic Publishing Service).
(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, n.d.)